

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PADA DISTRIK SALAWATI KABUPATEN SORONG

Glorta Santia M. Labat¹, Muh. Ridha Suaib², Nur hidaya,³

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

³Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Distrik Salawati; bentuk-bentuk kebijakan pelaksanaan program pembangunan kampung; dan pelaksanaan kebijakan dalam program pembangunan di Distrik Salawati. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Populasi penelitian ialah keseluruhan pegawai pemerintah kampung yang ada di Distrik Salawati, sementara sampel diambil 10 orang dari pegawai pemerintahan yang ada di Distrik Salawati. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah desa sangat berperan aktif dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan di daerahnya. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan kampung yaitu melakukan tatap muka dengan masyarakat untuk menyampaikan program-program yang akan dijalankan. Salah satu wujud pelaksanaan kebijakanyaitu pemerintah desa menghimbau kepada warganya untuk tidak meninggalkan kampung selama proses pembangunan berjalan.. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa pemerintah secara maksimal melibatkan warganya dalam melakukan pembangunan di wilayahnya.

Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan, Distrik Salawati.

PENDAHULUAN

Kebijakan Kepala Distrik Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Dalam beberapa tahun kedepan arahkan pada pembangunan berbasis Kampung merupakan salah satu langka yang kita akan tempu di masa yang akan datang dan harus di rasakan selama ini berkaitan dengan pemenuhan hak hak dasar masyarakat saoka asli sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi papua yang merupakan perlindungan hak hak masyarakat orang arar kampung, Pegunungan dan Pesisir, Khususnya dan provinsi papua pada Umumnya Yaitu Kewajiban untuk mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak hak masyarakat adat harus di akui bahwa sekarang masyarakat Saoka belum di penuhi sehinga mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan kesenjangan sosial antara Kampung, yang ada di wilayah Distrik Salawati, Rendanya Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan), Pendapatan Masyarakat (Ekonomi) kondisi ini di perparah oleh kurang nya kebijakan pemerintah, perhatian khusus dari kepala distrik yang berpihak kepada masyarakat Kampung.

Pemberantasan ke miskinian dan pemenuhan hak hak dasar masyarakat asli yang bertempat tinggal di Distrik Salawati akan di capai melalui Kebijakan Kepala Distrik dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Di Distrik Teminabuan yang meliputi pemenuhan makanan dan gizi, kesehatan , pendidikan,ekonomi, lokal. Insfratuktur Distrik Teminabuan Unsur-unsur yang merupakan pendekatan Pembangunan Wilayah Distrik Salawatiyaitu: Desentralisasi Fiscal dan kurang nya menyusunperencanaan program secara partisipatif, pelibatan masyarakat dalam menyusun program dan pengaawasan pelaksanaan secara langsung serta pembangunan kapasitas keamanan yang mampu melayani masyarakat secara optimal yang di rancang dalam suatu rancangan. Rahman, R. E., & Karsiman, K. (2017) menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan yang maksimal masyarakat perlu dilibatkan secara maksimal.

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat kepemimpinan birokrasi penyelenggara pemerintahan daerah, berkaitan pula dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dimana secara jelas ditekankan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Tujuan dalam Undang-Undang tersebut sesuai dengan alur pikir akademis yang berkembang secara universal bahwa Pemerintah Daerah dengan otonominya ditujukan untuk mencapai dua tujuan utama yaitu tujuan politik dan tujuan administrasi yakni mengisyaratkan Pemerintah Daerah untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Berfungsinya secara efisien dan efektif birokrasi pemerintahan daerah dapat terjamin apabila dapat diwujudkan tertib pemerintahan, tertib administrasi, tertib hukum, tertib kepegawaian, tertib keuangan dan tertib kegiatan-kegiatan dengan menerapkan prosedur dan system kerja yang standar dan ketertiban itu hanyalah dapat diwujudkan antara lain melalui kemampuan mengendalikan dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam organisasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Distrik Salawati Kabupaten Sorong. Waktu penelitian di rencanakan 2 bulan yaitu dari bulan sampai dengan bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017. Metode dalam penelitian penulis menggunakan Deskriptif dan Kualitatif. dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan bentuk-bentuk pada kelurahan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kepala distrik dalam pelaksanaan program pembangunan di kampung.

Menurut Sugiono (2010), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang diterapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pemerintah kampung yang ada di Distrik Salawati. Menurut Sugiono (2010) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Jadi yang menjadi sampel adalah 10 orang.

Interview usaha pengumpulan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh responden. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan cara tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Secara sederhana interview diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan cara

mempergunakan Tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian. Pengertian lain dari observasi (pengamatan) yaitu dengan mengamati secara langsung objek atau permasalahan yang ada lokasi penelitian untuk memperoleh data yang aktual. Istilah dokumentasi dari kata kerja document berarti, menyediakan dokumen, membuktikan dengan menunjukkan adanya dokumen. semua tulisan yang kumpulkan dan di simpan yang dapat di gunakan bila di perlukan, juga gambar atau foto.

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder Adapun data yang diperoleh melalui analisis deskripsi ini dilakukan dengan cara-cara penyajian dalam bentuk tabel dan gambar sesuai dengan keberadaan data yang sesungguhnya dan tidak menggunakan uji kualitatif. Sesuai dengan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif dan metode yang digunakan adalah kualitatif artinya menyajikan data secara naratif yang didukung oleh data kuantitatif sesuai dengan hasil perhitungan pada tabel dan analisis persentase. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan deskriptif yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menggambar data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat suatu kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Manajemen Kepala Kampung Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat

Agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar perlu adanya partisipasi masyarakat yang penuh dalam pembangunan, dalam menggerakkan masyarakat seorang kepala kampung setiap pagi melakukan perkumpulan masyarakat dengan cara membunyikan bel (lonceng) hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat berkumpul dan melakukan pelaksanaan pekerjaan pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala kampung wawal pada tanggal 17 Desember 2016 : “dalam mengumpulkan warga di kampung ini menggunakan lonceng agar warga mudah dalam mendapatkan informasi dari kepala kampung”.

Dalam mengatur suatu manajemen kampung, kepala kampung mempunyai peranan yang sangat besar terutama dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan pembangunan kampung. Karena partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan kampung mempunyai peranan yang besar, namun tidak terlepas dari partisipasi

seorang kepala kampung yang bijaksana. Program pembangunan kampung akan mengalami kemacetan atau keterlambatan dalam bidang pembangunan, karena majunya suatu pembangunan kampung selalu di dukung oleh peran penuh dari masyarakat sehingga kesejahteraan dan kemakmuran dari masyarakat akan mengalami peningkatan yang sangat pesat.

Pengertian dari perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat kampung adalah merupakan suatu metode teknik perencanaan yang mengfungsikan agar secara nyata di dalam menyusun perencanaan pembangunan yang bersumber dari pemerintah atau masyarakat untuk melaksanakan, dan memelihara serta mengembangkan hasil pembangunan. Dalam perencanaan partisipasi, semua warga atau kelompok dalam masyarakat pada dasarnya berhak untuk berperan aktif dalam pembangunan. Peran aktif dari masyarakat tidak terlepas dari manajemen kepala kampung yang baik, sehingga mampu mengerakan partisipasi masyarakat.

Penyampaian tersebut selaras dengan apa yang di jelaskan oleh kepala kampung walal berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Desember 2016 yaitu : “ dalam pembangunan kampung di butuhkan partisipasi masyarakat yang masif. Bahkan jiga ada program dalam pembangunan jalan atau jembatan yang mengerjakannya adalah warga kampung sendiri dengan cara bergotong royong”.

Kepala kampung dalam menjalankan pengawasan terhadap pembangunan, sehingga pembangunan yang berjalan di kampung dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian pembangunan di kampung pada akhir-akhir ini terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa lalu dimana pada saat pembentukan kampung pertama kali (Direktorat Jendral pembangunan Masyarakat Desa. hal 5. 2001).

Cara Seorang Kepala Kampung dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan di Kampung

Kemajuan kepala kampung dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat tergantung kepada seorang pemimpin atau Kepala kampung. Karena penguasa tunggal dalam pemerintah kampung adalah terdapat pada kepala kampung bersama-sama dengan pembantunya yaitu aparat-aparat kampung. Mereka adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga kampung. Selain itu, kepala kampung juga dapat menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian di dalam melaksanakan tugasnya, kepala kampung mempunyai batas-batas tertentu dan tidak dapat menuruti keinginannya sendiri. Cara

yang digunakan oleh kepala kampung dalam mengawasi pembangunan di kampung adalah pengawasan pembangunan secara langsung, supaya pembangunan yang dilakukan tidak mengalami kemacetan adalah dengan mambagi-bagi tugas kepada setiap RT. Tiap RT dapat menangani pekerjaan tersebut dan seorang kepala kampung dapat mengontrol jalannya pekerjaan yang dilakukan oleh RT dan warga masyarakat dari masing-masing RT. Jika dalam pekerjaan ada bagian RT yang pekerjaannya masih tertunda dapat dibantu oleh RT dan masyarakat yang pekerjaannya telah selesai dan kepala kampung dengan terus mengontrol, sehingga pembangunan di kampung dapat berjalan dengan baik dan rampun tepat waktu.

Hal tersebut sesuai dengan penyampaian dari kepala kampung rawa sugih, berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2016, yaitu : “dalam pelaksanaan pemerintahan kami di kampung rawa sugi, kami selalu mengontrol RT, dan Rw dengan cara melakukan pertemuan di kantor Kampung setiap satu bulan sekali membahas permasalahan kampung dan program-program apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat rawa sugih”.

Pada saat pelaksanaan pembangunan di kampung, kepala kampung melakukan tetap muka dengan semua masyarakat agar pada waktu pekerjaan di mulai, di harapkan kepada masyarakat untuk jangan keluar kampung. Karena pembangunan membutuhkan tenaga dari masing-masing masyarakat, namun diluar dari waktu yang disepakati bersama dengan masyarakat. Masyarakat dengan bebas mencari nafka. Bagi masyarakat yang tidak mendengar perintah yang di sampaikan kepala kampung kepada mereka, maka masyarakat tersebut akan dikenakan sanksi berupa teguran langsung.

Pernyataan tersebut selaras dengan hasil wawancara pada tanggal 12 Desember 2016 dengan kepala kampung rawa sugih, yaitu : “ dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pembangunan kampung baik membangun saluran-saluran air atau rumah ibadah kami selaku kepala kampung terlibat langsung bersama-sama dengan masyarakat dan berada di tengah-tengah warga untuk melakukan pekerjaan itu”.

Masalah-Masalah Yang Dihadapi Kepala Kampung Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Masalah yang dihadapi oleh kepala kampung pada saat melakukan pembangunan seperti pembangunan rumah penduduk, kantor kepala kampung, sekolah, puskesmas, jembatan, jalan, jaringan telkomsel, air bersih dan tempat peternakan sapi antara lain . Yang menjadi penghambat terbesar yaitu berupa tanah adat, infra struktur jalan, biaya pengakutan dan

bahan bangunan. Masalah tanah adat merupakan masalah yang sering terjadi di kampung yang kadang kala memperlambat jalannya pembangunan.

Kondisi tersebut sesuai dengan penyampaian kepala kampung malaus pada wawancara yang di lakukan pada tanggal 21 Desember 2016, yakni : “dalam proses-proses pembangunan di kampung terutama yang berkaitan dengan infratrutuk penghambat terbesarnya dalah masalah ganti rugi tanah terutama masalah pelepasan tanah adat”. Hal tersebut sering disebabkan oleh pemilik yang sering melakukan pemalangan pada lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kampung bersama masyarakat sebagai lokasi untuk pelaksanaan pembangunan, sehingga waktu yang ditentukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu bangunan dalam jangka waktu tertentu mengalami keterlambatan untuk melangkah pada tahap pembangunan berikut. Namun ada juga hal lain yang dilakukan pemilik yaitu seperti menjual sebagian dari lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk pembuatan bangunan.

Hambatan dalam bidang lain yaitu infrastruktur jalan. Hal ini juga dapat memperlambat jalannya pembangunan. Karena jalan merupakan penghubung utama antara kampung dengan tempat pembelanjaan bahan bangunan yang terletak di wilayah perkotaan yang sangat jauh. Jalan merupakan jalan penghubung antara kampung dengan pusat pembelanjaan jalan ini sering mengalami kerusakan pada waktu hujan yaitu berupa jalan berlumpur dan terputus karena jalan ini hanya diserti tidak di aspal, sehingga mengakibatkan bahan bangunan tidak dapat diangkut dengan truk secara langsung ke kampung. Jarak yang jauh pun membuat biaya transportasi yang dibutuhkan untuk pengangkutan bahan bangunan sangat mahal harganya \pm 700.000 sekali jalan. Bahan bangunan setiap tahun mengalami peningkatan harga sehingga target pemerintah untuk membuat bangunan dalam jumlah besar tidak terpenuhi. Dalam satu tahun bangunan yang bisa dicapai hanya mencapai empat (4) buah rumah. Sedangkan bangunan yang lain ditunda ke tahun berikutnya. Hal-hal inilah yang sering menjadi kendala terbesar sehingga pembangunan sering mengalami kemacetan serta ketinggalan pembangunannya dari kampung lain.

Hal tersebut sesuai dengan penyampaian kepala kampung malaus berdasarkan hasil wawancara tanggal 11 Desember 2016, yaitu : “ jarak yang jauh dengan penjualan hasil penen dari masyarakat maudus ini sangat menghambat perekonomian masyarakat hal ini sangat berpengaruh dengan biaya tranportasi yang tinggi di tambah lagi apabila musim hujan jalannya

sulit untuk dilalui karena becek dan banyak yang rusak, yang mengakibatkan tidak bisa masuknya mobil untuk mengangkut hasil ladang agar bisa di bawah ke kota untuk di jual”.

Solusi Yang Diambil untuk Mengatasi Masalah-Masalah yang Dihadapi pada Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Solusi yang di pakai oleh kepala kampung dalam mengatasi masalah yang mengambat pembangunan di kampung adalah menyangkut hak wilayah atau tanah adat yang selalu menjadi kendala untuk pelaksanaan pembangunan di kampung diharapkan kiranya pemerintah daerah setempat yaitu pemerintah lebih memperhatikan hak-hak pemilik tanah adat yaitu dengan cara membayar ganti rugi kepada pemilik tanah adat sesuai dengan permintaan mereka agar tidak lagi terjadi pemalangan terhadap lokasi pembangunan. Selain itu perlu adanya pembuatan surat sertivikat tanah disertai dengan surat pelepasan tanah adat yang di buat oleh pemerintah kampung bersama dengan pemilik tanah adat yang menerangkan bahwa pihak pemilik tanah adat telah menyerahkan tanahnya kepada pemerintah kampung agar supaya dikemudian hari tidak lagi terjadi pemalangan dari pihak pemilik tanah adat terhadap lokasi yang akan di lakukan pembangunan, karena sudah ada bukti yang menerangkan serta memperkuat bahwa tanah tersebut duluhnya adalah milik pemilik tanah adat namun sekarang tanah atau lokasi pembangunan tersebut adalah milik pemerintah setempat atau pemerintah kampung.

Hal tersebut sesuai dengan penyampaian kepala kampung malaus pada wawancara tanggal 12 Desember 2016, yaitu : “dalam proses pembangunan kampung ini agar lebih cepat dalam proses kemajuannya, kami menggharapkan pemerintah daerah untuk membuat peraturan yang jelas masalah pelepasan tanah adat agar dalam kami membangun tidak terkendala lagi dengan pemalangan dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan konflik antar masyarakat”.

Menyangkut infra struktur jalan perlu adanya perhatian yang lebih serius dari pemerintah terhadap jalan raya yang menghubungkan pusat perkotaan dengan kampung, karena jalan tersebut merupakan satu kebutuhan masyarakat yang harus di perhatikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu jalan tersebut harus di perbaiki lebih baik yaitu dengan cara mengaspalkan agar supaya ketika musim hujan tidak lagi mengalami kerusakan yang mengakibatkan terputusnya hubungan transportasi antara daerah perkotaan dengan kam pung klawana dan juga memperbaiki jembatan-jembatan yang rusak. Selain itu dibelahan kiri dan kanan jalan harus

buatkan parit atau saluran air. Selain itu, daerah atau tempat yang sering mengalami longsor harus dibuatkan tanggul agar tidak mengakibatkan terputusnya jalan. Hal ini perlu diperhatikan karena jalan merupakan kebutuhan yang mempermudah masyarakat karena dapat membantu meringankan dan mempercepat kebutuhan masyarakat kampong klawana yang terdapat di perkotaan. Seperti mereka harus pergi ke kota untuk berbelanja kebutuhan pribadi dan berbelanja bahan bangunan, penjualan hasil kebun, hasil nelayan, berobat ke kota pada saat sakit karena persediaan obat yang tersedia di Puskesmas habis, anak-anak yang mengikuti pendidikan pada tingkat SMK, maupun perguruan tinggi di kota, karena SMK dan perguruan tinggi belum ada di kampung, Yang hanya terdapat di kampung adalah SD, SMA dan SMP yang memiliki jarak dekat serta mudah dijangkau oleh siswa dan juga adanya kebutuhan-kebutuhan lain yang harus diselesaikan di kota. Karena pentingnya jalan bagi masyarakat kampung sehingga sangat diharapkan kepada pemerintah untuk selalu memperhatikan jalan tersebut (jalan Sorong Klamono).

Karena semakin banyaknya jumlah penduduk sehingga kebutuhan akan tempat tinggal pun semakin banyak di butuhkan. Karena banyak kebutuhan akan bahan bangunan membuat bahan bangunan pun semakin langka. Dengan demikian bahan bangunan yang setiap tahun mengalami peningkatan harga pemerintah harus menambah jumlah bantuan yaitu berupa bantuan dana sosial atau dana Respek dalam setiap tahun anggaran karena mengingat harga bahan-bahan bangunan selalu mengalami peningkatan harga dalam setiap tahunnya.

Diharapkan kepada Pemerintah untuk menyiapkan alat transportasi wilayah pedesaan, supaya dapat membantu dalam pengangkutan bahan bangunan. Dengan adanya alat transportasi tersebut dapat membantu mempercepat pembangunan di kampung. Pemerintah memberikan dana yang berupa uang kepada pemerintah kampung untuk membuat koperasi kampung yang menyediakan bahan-bahan bangunan. Sehingga mempermudah dalam pembuatan bangunan dan pekerjaan tersebut cepat terselesaikan karena bahan yang dibutuhkan sangat dekat dengan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan pada BAB IV sebelumnya maka peneliti melakukan kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; Kemampuan kepala kampung dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat tergantung kepada seorang

pemimpin atau Kepala kampung itu sendiri. Namun adapun cara-cara yang digunakan oleh kepala kampung dalam mengawasi pembangunan di kampung adalah pengawasan pembangunan seraca langsung; Dalam mengatur suatu manajemen kampung, kepala kampung mempunyai peranan yang sangat besar terutama dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan pembangunan kampung. Karena partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang berdiri di kampung mempunyai peranan yang besar, karena tanpa partisipasi dari masyarakat segala jenis kegiatan tidak akan berjalan dengan baik; Masalah yang di hadapi kepala kampung dalam melaksanakan pembangunan di kampung klwana adalah berupa masalah tanah adat, infra struktur jalan, tingginya harga bangunan dan tingginya harga transportasi pengangkutan bahan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarin T.M., 2005. *menyusun metode penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aprianto Patabang. 2010. *faktor-faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan*, Universitas Diponegoro. Semarang
- Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Bryant. C. dan White, Louise. 1987. *Manajemen Pembangunan*. LP3ES, Jakarta.
- Dunn, W.N. 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan/ Penyunting Muhadjir Darwin dkk), Gadjah Mada University Press. Jakarta
- George edwards III (1980), *Implementing Public policy*, Fortune. London
- Grindle, M.S. 1980, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princetone University Press. London
- Pressman & Wildavsky, (1988), *Implementation* Penerbit: Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Rahman, R. E., & Karsiman, K. (2017). Peran Badan Musyawarah Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Kasus Di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong). *Gradual*, 6(2), 12-29.
- Said Zainal Abidin. 2004. *Kebijakan Publik*. PT. Pradya Paramita, Jakarta.
- Wayne Parsons (2005), *Pengantar dan praktek Analisis Kebijaakan*, Princetone University Press. London
- William N Dunn, (1995) *Public policy Analysis*, Princetone University Press. London